

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERKAIT PEMBUATAN AKTA DI LUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS MELALUI CYBER NOTARY

Pembuatan akta Notaris melalui *cyber notary* yang tidak memerlukan tatap muka, dapat menimbulkan peluang keberadaan para pihak berada di luar wilayah Jabatan Notaris. Permasalahan ini mengakibatkan ketentuan wilayah jabatan Notaris menjadi rancu, sehingga terjadi disharmonisasi antara ketentuan wilayah jabatan Notaris secara konvensional, dengan praktik Notaris yang dilakukan dengan *cyber notary*.

Permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah bagaimana keabsahan akta yang dikeluarkan di luar wilayah Jabatan Notaris melalui *cyber notary* dan bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dikeluarkan di luar wilayah jabatan Notaris melalui *cyber notary*. Tujuan penulisan tesis ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap akta yang dikeluarkan di luar wilayah jabatan Notaris melalui *cyber notary*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif dengan model deskriptif, kemudian dari analisis yang dilakukan ditarik kesimpulan dengan cara logika deduktif. Penyajian data dilakukan dengan editing agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa suatu akta yang dibuat di luar wilayah jabatan Notaris melalui *cyber notary* akan mengakibatkan perbuatan hukum tersebut tidak sah hal ini disebabkan perbuatan tersebut sukar untuk dapat memenuhi ketentuan dalam UUJN. Atas dasar perbuatan yang tidak sah tersebut maka produk hukum yang dihasilkan pun menjadi tidak sah, sehingga kekuatan hukumnya menjadi lemah. Akibat hukum dari terjadinya pertentangan antara UUJN dengan UU ITE ini maka kekuatan akta notaris yang dibuat berdasarkan *cyber notary* hanya memiliki kekuatan hukum seperti akta di bawah tangan, bukan akta otentik.

Saran dari penulis berdasarkan penelitian Tesis ini adalah Pemerintah diharapkan segera melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan antara UUJN, UUPT dan UU ITE. Tujuannya untuk mencegah kekosongan hukum jika transaksi elektronik di bidang kenotariatan sudah marak dilakukan, serta menjamin akta yang dibuat melalui *cyber notary* adalah akta otentik. Pemerintah dan INI diharapkan bekerjasama untuk melakukan perubahan pada UUJN, guna memberikan rasa aman kepada Notaris dalam bertindak dan memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan *cyber notary*.

Kata Kunci: notaris, wilayah jabatan, *cyber notary*.

ABSTRACT

THE CONSEQUENCE OF THE ISSUED A DEED OUTSIDE OF NOTARY TERRITORY THROUGH THE CYBER NOTARY

Notary deed issued through cyber notary which requires no face to face, may create opportunities for the existence of parties outside the territory of a notary. This resulted in the notary regulation of the territory of notary is unclear, in which there was a disharmonization between the regulatory of the territory of notary, with the practice of notary through cyber notary.

The issue that will be discussed in this thesis is how the validity of the deed that is issued outside the territory of the notary through the cyber notary and how the legal result of the deed being issued outside the territory of the notary. The purpose of the writing of this thesis is to know and analyze the power of the law and the effect of the law on the deed issued outside the territory of a notary, if it is needed in verification.

The study uses a normative approach method with analytic descriptive research specifications. The type of data used is secondary data. Secondary data is divided into primary law material, secondary legal material and tertiary legal material. The data-gathering technique used is with literature studies, which is the way of collecting secondary data. The data analysis used is a qualitative analysis with a descriptive model, and then from the analysis done is drawn to a conclusion by a deductive logic. Data presentation is done with editing in order to be understood and analyzed according to desired purposes.

Research has shown that a deed made outside of notary territory through cyber notary would render legal actions illegal because they are difficult to meet the terms of the UUJN. On the basis of such unauthorized acts the legal product produced would become invalid, resulting in a weakening of its legal force. As a result of the legal interference between the UUJN and UU ITE, the power of notary deed issued through cyber notary simply has the power of the law as a deed under the hand, not an authentic one.

The advice of authors based on research on this thesis is that governments are expected to immediately harmonization of legislation between UUJN, UUPT and UU ITE. The purpose is to prevent a legal vacuum if an electronic transaction in the marketplace has been made public, and to ensure a deed made through the cyber notary is an authentic one. The government is expected to cooperate with INI to make changes to the UUJN, to provide a sense of security to the notary to act and decide everything to do with the cyber notary.

Keyword: notary, territory, cyber notary.